

Hakikat Komunikasi Politik Tinjauan Filosofis, Teoritis, Empiris dan Hakikat *Feedback* atau Respons

Soemarno, AP



PENDAHULUAN

Sejak ada Adam dan Hawa menghuni planet bumi, sejak itu pula komunikasi menyertai kedua makhluk Tuhan tersebut. Simbol-simbol komunikasi terhampar luas, yang ada kalanya berada di luar kemampuan anak cucu Adam. Setelah umat manusia berkelompok dan berkaum-kaum, bersekutu-sekutu dan berbangsa maka simbol-simbol komunikasi menjadi sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh faktor alam, letak geografis dan kebiasaan yang beragam pula.

Proses komunikasi berawal dari skala kecil yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer (makan, minum, kebutuhan seks), lalu bergeser ke skala yang lebih luas dan lebar. Semakin manusia maju dan berkembang, semakin rumit serta kompleks pula masalah-masalah yang dihadapi komunikasi. Perkembangan tingkat berpikir amat berpengaruh pula terhadap sifat, bentuk dan jenis pengguna simbol komunikasi. Pada gilirannya individu manusia tidak lagi hanya terlibat dalam hubungan individual, namun telah melibatkan diri ke dalam ikatan-ikatan atau institusi-institusi kemasyarakatan yang lebih luas.

Institusi kemasyarakatan yang paling tinggi derajatnya adalah institusi politik (*political institution*) yang disebut negara. Negara merupakan institusi kemasyarakatan yang paling tinggi derajatnya, karena diberi atribut kekuasaan (*power*) yang tidak ada pada institusi kemasyarakatan lain (Koentjaraningrat, 1985), di antaranya seperti:

1. Institusi kekerabatan (*Kinship Institution*).
2. Institusi perekonomian (*Economical Institution*).
3. Institusi kebudayaan (*Cultural Institution*) dan sebagainya.

Pada tahapan ini maka simbol-simbol komunikasi telah memasuki struktur kekuasaan. Selanjutnya, sumber-sumber komunikasi berikut simbol-simbolnya dikelola secara efektif, bahkan dijadikan sumber untuk mempertahankan kekuasaan. Pada tataran inilah maka komunikasi telah berada dalam lingkup kajian “Komunikasi Politik”.

Untuk memberi rujukan secara lengkap tentang apa itu komunikasi politik, maka dalam modul ini Anda dapat memahami tentang tinjauan filosofis, teoritis, empiris, hakikat umpan balik (*feedback*) dan reaksi (*response*).

Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang komunikasi politik dilihat dari:

1. tinjauan filosofis;
2. tinjauan teoritis dan empiris;
3. hakikat *feedback* dan respons.

KEGIATAN BELAJAR 1

Komunikasi Politik: Tinjauan Filosofis

Setiap ilmu pengetahuan bernaung pada filsafat masing-masing ilmu. Filsafat merupakan “Master Scientarium” atau induk dari segala ilmu.

Demikian halnya komunikasi politik bernaung pada dua diametral filsafat, yaitu filsafat komunikasi dan filsafat politik. Hal ini mengandung makna bahwa kedua diametral tersebut masing-masing bersifat *spesies*, sedangkan filsafat yang menaunginya bersifat *genus*. *Spesies* dalam artian khusus dan *genus* dalam artian umum. Secara *genus*, filsafat sebagai renungan manusia tentang alam semesta untuk mencari hakikat kebenaran dan keadilan hakiki.

Filsafat komunikasi politik adalah renungan manusia tentang hakikat simbol-simbol kekuasaan dalam realitas keberadaannya di lingkup alam semesta. Hal ini untuk menjawab bagaimana seharusnya manusia berkomunikasi, apakah dengan menggunakan simbol-simbol kekuasaan yang diaktualisasikan agar tidak ingkar dari hakikat kebenaran dan keadilan dalam lingkup alam semesta.

Pada hakikatnya, komunikasi politik adalah pengaktualisasian simbol-simbol komunikasi oleh manusia, baik sebagai penguasa maupun sebagai manusia biasa, dalam kehidupan sebagai masyarakat atau sekaligus dalam kehidupan bernegara.

A. HAKIKAT MANUSIA DAN SIMBOL-SIMBOL KEKUASAAN

Manusia secara kodrat, adalah pengguna dan pembentuk simbol-simbol komunikasi, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Hal ini refleksi dari kodrat manusia sebagai makhluk yang hidup dengan manusia lain, atau hidup bermasyarakat (*civil society*) yang disebut dalam bahasa Jerman “Buergerliche Gesellschaft”.

Manusia mempunyai struktur ganda yaitu *Tahu* dan *Mau*. Untuk menata kedua simbol (tahu dan mau) ini, dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penataan normatif.
2. Penataan efektif (Magnis, 1987).

Kedua cara ini, merupakan pedoman sikap perilaku manusia agar tidak ingkar dari hakikat hidup dalam alam semesta, yaitu simbol-simbol kebenaran dan keadilan yang hakiki.

Pertama, penataan normatif yang merupakan penataan dari segi hukum, dengan mengakomodasi simbol-simbol hukum. Hukum terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang membolehkan dan melarang. Namun, simbol-simbol yang dibentuk oleh penataan ini, tidak memberi jaminan terhadap perubahan sikap perilaku manusia.

Cara penataan yang dapat mengubah perilaku manusia hanyalah dengan cara penataan yang kedua, yaitu penataan efektif. Penataan efektif dilakukan oleh negara yang diberi atribut kekuasaan dan merupakan penataan “*de facto*” yang secara realitas menentukan kelakuan masyarakat.

Negara sebagai kontur, mewadahi berbagai ragam simbol-simbol komunikasi, dan merupakan institusi kemasyarakatan tertinggi dari institusi-institusi kemasyarakatan lainnya seperti institusi kekerabatan (*kinship institution*), institusi kebudayaan (*cultural institution*) dan masih banyak lagi institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang konsep negara sebagai institusi kemasyarakatan dapat Anda baca dalam buku “Pengantar Ilmu Antropologi” karangan Koentjaraningrat. Negara pada hakikatnya bertugas untuk melindungi warga negaranya, dan mewujudkan simbol-simbol kesejahteraan lahir dan batin.

Anda kadang-kadang menjumpai terminologi warga negara, rakyat dan masyarakat, ketiganya sering digunakan secara bergantian. Warga negara sebagai terminologi hukum, rakyat adalah terminologi politik, dan masyarakat sebagai terminologi sosiologi.

Individu sebagai dimensi kesosialan, diharapkan memiliki tiga diametral yaitu: *Pertama*, penghayatan spontan individual, *kedua*, berhadapan dengan lembaga-lembaga, *ketiga*, melalui pengertian-pengertian simbolis.

Dalam proses komunikasi politik, individu-individu tidak lagi berada dalam tindakan spontan individual, namun kegiatan komunikasi individu berada dalam pola-pola tindakan bersama, yaitu dalam lembaga-lembaga. Lembaga yang paling tinggi tingkat frekuensi penggunaan simbol-simbol komunikasi, adalah lembaga otoritatif atau lembaga kekuasaan.

Secara filosofis pengelola simbol harus diakui keabsahannya melalui tiga sifat pengakuan. *Pertama*, legalitas normatif yaitu pengakuan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan produk-produk kebijakan komunikasi yang harus dapat dilaksanakan oleh publik (komunikan), karena

merasa bahwa kebijakan tersebut mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik. *Kedua*, legitimasi demokratis yang terkait dengan pengisian struktur kekuasaan yang diselenggarakan secara demokratis, seperti melalui pemilihan umum dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif kepentingan. *Ketiga*, legitimasi moral yaitu pengakuan berdasar prinsip-prinsip moral. Moral selalu terkait dengan perspektif simbol baik atau buruk dan tanggung jawab.

Dalam proses komunikasi politik moral melandasi sikap perilaku para pengelola sumber-sumber komunikasi di dalam upaya mencapai tujuan komunikasi, yaitu terpenuhinya tujuan tersebut secara komplementer (tidak ada yang dirugikan).

B. HAKEKAT SIMBOL KOMUNIKASI POLITIK

Einstein dalam teori relativisme membicarakan pula tentang simbol, bahwa kehidupan manusia pada dasarnya sebagai pengguna simbol. Hidup manusia dipengaruhi oleh simbol-simbol atau lambang-lambang.

Simbol pada hakikatnya mewakili realita atau mewakili abstraksi-abstraksi yang tidak dapat dipersonifikasikan dalam alam pikiran dan perasaan.

Simbol adalah mediator antara individu, kelompok, etnis kultur, bangsa dengan yang lainnya. Atau dapat pula dinyatakan bahwa simbol menghubungkan antara *micro cosmos* dengan *macro cosmos*. Dengan simbol tersebut, maka hambatan-hambatan *geo cosmos* dapat diatasi, bahkan lebih dari itu, peristiwa di berbagai belahan bumi dapat diketahui dan dapat dipantau. Lahirnya simbol-simbol tersebut pada hakikatnya sebagai produk kontrak simbol antar etnis budaya.

Sejarah mencatat bahwa simbol lahir mengikuti kehadiran umat manusia. Semakin manusia maju dan berkembang, semakin kompleks pula simbol yang digunakan. Manusia mulai menggunakan simbol-simbol komunikasi dalam pola-pola kehidupan bersama.

Manusia yang tergabung dalam pola kehidupan, mempunyai simbol-simbol khusus atau tertentu, yang hanya dipahami oleh kelompok bersangkutan.

Simbol dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal yaitu:

1. bahasa, baik lisan maupun tulisan;
2. gambar-gambar;

3. isyarat-isyarat;
4. gerak-gerak dan raut muka.

Sedangkan, simbol dalam komunikasi politik adalah simbol-simbol kekuasaan dalam struktur kekuasaan dan dalam infrastruktur kekuasaan.

Perbedaan simbol sebagai faktor penyebab berlangsungnya tukar menukar simbol tidak lagi berlingkar pada skala kecil, namun telah melebar kepada skala yang lebih besar dan lebih luas.

Secara krusial simbol-simbol tersebut, telah berkembang ke dalam norma-norma tertentu yang diwarnai oleh konsep-konsep pemikiran berbeda misalnya ideologi, yaitu pemikiran yang didasari pada nilai-nilai (*value*) tertentu. Simbol-simbol komunikasi yang berada dalam lingkup ideologi telah memiliki karakter pembeda, artinya telah memiliki kecenderungan atau *a priori*. Sebagai contoh, persepsi-persepsi yang disebut partai politik atau dalam terminologi komunikasi disebut *monomorphic* dan partai itu sendiri disebut *homophily*.

Pada tahapan ini, individu yang mengikatkan dirinya pada partai dapat dikategorikan ke dalam empat tipe. *Pertama*, individu yang mengikat diri pada partai adalah untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kepentingan yang hendak dicapai. Partai dijadikan alat atau mekanisme untuk mempercepat tercapainya kepentingan tersebut. Simbol-simbol komunikasi diciptakan untuk mendapat dukungan dan kepercayaan orang lain.

Kedua, dengan memasuki atau menjadi anggota partai akan merasa aman dari tindakan dan sikap perilaku orang lain pada dirinya, atau partai sebagai instrumen untuk meningkatkan status sosial. *Ketiga*, individu yang betul-betul ingin memperbaiki situasi untuk kepentingan bersama, sehingga orientasi berpikirnya lebih pada kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan nusa dan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, individu mulai memasuki simbol-simbol komunikasi yang menjadi isu sentral dan isu perbaikan yang mendasar. Berbeda dengan kedua tipe tersebut di atas, maka pada tahapan ketiga ini, adalah untuk mencapai harapan individu dan individu mulai mendekati diri pada sumber-sumber kekuasaan.

Dari ketiga macam tipe tersebut di atas, maka tipe *keempat* memberi isyarat bahwa individu masuk dalam partai hanya terbawa arus dan tidak menghayati maksud tujuan partai. Komunikasi politik tidak diinterpretasikan ke dalam kepentingan mereka.

Hal ini mengandung makna setiap kepentingan tidak mungkin dapat terpenuhi apabila tidak ditransformasikan melalui lambang-lambang komunikasi. Karena secara filosofis, lambang-lambang komunikasi selalu menyertai kehidupan manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat maupun secara organisasi atau partai politik.

Oleh sebab itu, simbol-simbol yang muncul pada komunikasi politik sangat beragam, bahkan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat negara. Hakikat simbol bagi suatu kelompok atau suatu organisasi merupakan personifikasi dari perilaku organisasi. Bahkan mewakili ungkapan pikiran, pendapat dan perasaan. Sebagaimana halnya manusia, organisasi pada hakikatnya adalah komunitas manusia, sehingga perilaku organisasi adalah cerminan perilaku manusia.

Kehadiran simbol komunikasi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya untuk memelihara dan mempererat serta memperluas hubungan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Karena itu hakikat kehidupan manusia dalam mempertahankan kehidupannya adalah produk pertukaran simbol.

Tinjauan filosofis tentang simbol memberi makna sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Bahkan seorang filsuf bernama Einstein berpendapat bahwa kehidupan empiris manusia terdiri dari simbol-simbol yang mewakili kenyataan empiris dan khayal yang sulit untuk diekspresikan.

Demikian pentingnya simbol-simbol tersebut dalam proses komunikasi politik, ataupun proses komunikasi pada umumnya, maka simbol-simbol yang digunakan harus merupakan produk “kesepakatan bersama” (*symbol contract*) yang akan memberi makna sebagai *meaningful symbol* atau simbol yang berarti. Makna simbol yang berarti adalah simbol yang dapat dipahami bersama, baik oleh komunikator maupun oleh komunikan.

Demikian halnya dalam kehidupan kenegaraan, maka simbol-simbol yang digunakan harus dipahami oleh elit struktur kekuasaan, elit masyarakat dan warga negara pada umumnya, atau simbol-simbol yang digunakan dalam lingkup suatu sistem.

Simbol komunikasi politik yang digunakan dalam sub-sistem suprastruktur adalah simbol-simbol yang digunakan dalam struktur kekuasaan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pada sub-sistem infrastruktur yaitu simbol-simbol yang tersebar secara bervariasi.

Tinjauan filosofis terhadap simbol-simbol komunikasi politik lebih berorientasi pada partai politik, dengan tidak mengabaikan sub-unit sistem

yang lainnya seperti: figur politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan dan alat komunikasi politik.

Simbol-simbol komunikasi yang berkembang dalam partai politik berdampak tajam terhadap simbol-simbol yang berkembang pada struktur kekuasaan bahkan antara keduanya bersifat berkaitan atau saling berpengaruh.

Kondisi infrastruktur menunjukkan karakteristik suatu sistem politik. Pada negara penganut ajaran demokrasi, kehidupan infrastruktur sebagai faktor yang sangat menentukan kehidupan negara, karena struktur kekuasaan diisi oleh elemen infrastruktur melalui mekanis pemilihan umum.

Simbol-simbol politik pada partai politik merupakan produk kontrak simbol antar anggota partai untuk:

1. Menyamakan langkah partai dalam mencapai tujuan partai.
2. Menyamakan persepsi tentang kelangsungan hidup dan eksistensi partai.
3. Menentukan simbol-simbol yang efektif bagi perjuangan partai.
4. Komitmen moral terhadap sistem nilai yang berlaku dalam partai.

Oleh sebab itu maka setiap partai memiliki unsur pembeda terhadap partai lain, karena perbedaan inilah maka perlu adanya konsensus yang memacu terwujudnya kolegialitas dan tingkat toleransi.

Sedangkan simbol-simbol dalam kehidupan negara hakikatnya adalah untuk:

1. Mewujudkan karakter bangsa yang memiliki kepribadian (*personality*) sebagai suatu bangsa (*nation*).
2. Mewujudkan loyalitas warga negara terhadap negaranya.
3. Meningkatkan kualitas toleransi terhadap ego kelompok (partai).
4. Meminimalkan kondisi konflik yang merugikan negara.

Penjelasan yang terkait dengan konflik dapat Anda baca pada modul selanjutnya. Dari ungkapan di atas, dipahami bahwa kehadiran simbol-simbol komunikasi tidak sekedar pelengkap, namun sebagai suatu unsur yang sangat menentukan kehidupan negara.

C. HAKEKAT KEHADIRAN ALAT KOMUNIKASI POLITIK

Alat komunikasi politik dengan terminologi media komunikasi politik (*political communication tools*) dapat berupa media cetak, media elektronik dan cara-cara yang bersifat konvensional. Alat komunikasi politik, pada hakikatnya, adalah untuk memperluas nuansa pandang dan berpikir yang tidak terpasung kebekuan-kebekuan egosentris yang dapat memperlebar perbedaan.

Fungsi yang paling dominan pada alat komunikasi politik adalah sebagai:

1. alat untuk menyebarkan *statement* politik;
2. alat informasi dan pendidikan politik;
3. alat propaganda politik;
4. alat konsolidasi dan konsensus nasional;
5. alat sosialisasi politik.

Hakikat keberadaan media sangat memberi makna dominan bagi kehidupan manusia. Selain kehadirannya untuk memberi rujukan kepada masyarakat tentang hal-hal yang belum diketahui atau tidak diketahui, media memberi manfaat pula untuk meminimalis pendapat yang berbeda dan untuk memberikan perbandingan tentang nilai yang sangat berguna bagi masyarakat bersangkutan. Selain itu, media massa membuka cakrawala pandang peristiwa-peristiwa yang berada di ruang waktu di berbagai belahan dunia.

Dalam menggunakan media ini tidak dilihat dari benda matinya saja, namun dilihat pula dari sisi manfaat dan tujuan produksi media tersebut, sehingga dengan media massa dapat menembus ruang dan waktu yang sulit ditembus secara personal. Faktor geografis tidak lagi menjadi hambatan utama yang selama ini menjadi masalah bagi negara-negara yang tertinggal di bidang teknologi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang filsafat?
- 2) Jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi politik dalam kaitan dengan filsafat?
- 3) Setiap individu berada dalam struktur ganda, jelaskan struktur ganda tersebut?
- 4) Komunikasi politik selalu berkaitan dengan kekuasaan. Jelaskan!
- 5) Kekuasaan baru diakui keabsahannya apabila memenuhi tiga syarat. Sebutkan ketiga syarat tersebut?
- 6) Sebagai anggota masyarakat setiap individu dihadapkan kepada tiga diametral. Jelaskan secara rinci ketiga diametral tersebut?
- 7) Apa yang anda pahami tentang simbol-simbol komunikasi politik? Jelaskan!
- 8) Apa yang anda pahami tentang hakikat kehadiran media komunikasi politik? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan.

Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam Latihan 1, pelajari dengan cermat materi Kegiatan Belajar 1, jika Anda belum paham diskusikan dengan teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Filsafat sebagai renungan manusia tentang alam semesta untuk mencari hakikat kebenaran dan keadilan.

Komunikasi politik bernaung dalam dua filsafat keilmuan tentang apa yang seharusnya simbol-simbol komunikasi diaktualisasikan untuk mengoperasionalkan kekuasaan.

Individu-individu manusia telah berada dalam pola-pola tindakan bersama yaitu lembaga-lembaga.

Manusia berada dalam struktur ganda. Untuk penataan sifat ganda tersebut dilakukan dengan penataan normatif (hukum) dan penataan efektif (kekuasaan).

Kekuasaan harus sesuai dengan legalitas normatif, legitimasi demokratis dan legitimasi moral.

Dalam proses komunikasi politik, simbol-simbol komunikasi di tata secara bijak untuk tercapainya tujuan komunikasi yang bersifat komplementer.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Filsafat komunikasi politik membahas tentang
 - A. apa yang seharusnya manusia berkomunikasi dalam lingkup kekuasaan
 - B. pengelolaan simbol-simbol komunikasi untuk mencari kebenaran dan keadilan hakiki
 - C. filsafat komunikasi politik bernaung pada *master scientarium*
 - D. filsafat komunikasi politik sebagai pedoman agar tidak ingkar dari hakikat alam semesta

- 2) Simbol-simbol komunikasi lebih sering digunakan oleh lembaga
 - A. normatif
 - B. otoritatif
 - C. kekuasaan pengelola sumber-sumber komunikasi
 - D. suprastruktur

- 3) Manusia dalam kontur masyarakat dihadapkan kepada
 - A. norma-norma simbol kelembagaan.
 - B. penghayatan spontan individual.
 - C. nilai-nilai etis kemasyarakatan.
 - D. pola-pola tindakan bersama.

- 4) Secara etis simbol-simbol komunikasi kekuasaan harus memenuhi
 - A. pengakuan legalitas normatif atau legalitas hukum
 - B. legitimasi simbolik demokratis
 - C. simbol-simbol legitimasi moral
 - D. terakomodasi simbol-simbol kepentingan masyarakat

- 5) Hakikat penggunaan simbol-simbol komunikasi untuk
- mewakili nilai-nilai abstrak ke dalam realita
 - menzamankan perspektif dan persepsi
 - personifikasi simbol-simbol komunikasi untuk mewujudkan komunikasi komplementer
 - menyamakan persepsi antara subjek dan objek komunikasi
- 6) Komunikasi politik lebih bersifat formal karena
- simbol-simbol dikelola oleh lembaga otoritatif
 - simbol-simbol dioperasikan secara vertikal
 - simbol-simbol dioperasikan untuk membentuk kebijakan komunikasi politik
 - sumber-sumber komunikasi dikuasai oleh lembaga-lembaga kekuasaan
- 7) Dalam kelompok partai, simbol dibentuk
- secara khusus yang hanya diketahui oleh kelompoknya
 - untuk menyatukan langkah perjuangan
 - untuk memberi motivasi terhadap anggota
 - sebagai faktor pembeda terhadap kelompok lain

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Komunikasi Politik:
Pendekatan Teoritis dan Empiris**

☉ Pada Kegiatan Belajar 1, Anda telah mempelajari hakikat komunikasi politik melalui pendekatan filosofis. Selanjutnya pada Kegiatan Belajar 2, Anda akan mempelajari komunikasi politik dalam pendekatan teoritis dan empiris.

A. PENDEKATAN TEORITIS

Secara teoritis komunikasi politik berada dalam wilayah *das sollen* (apa yang seharusnya), atau berada dalam dunia ideal, dunia angan-angan yang tidak ingkar dari ikatan norma atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman sikap perilaku pengelola sumber-sumber komunikasi, dan pembentuk simbol-simbol komunikasi.

Kajian teoritis melihat komunikasi politik sebagai ilmu rohaniah (*geistest wissenschaft*) dan sebagai ilmu budaya (*kultur wissenschaft*). Komunikasi politik sebagai ilmu murni tidak bebas nilai (*non value free*), hal ini disebabkan karena ilmu tersebut dalam penerapannya berada dalam lingkup nilai, sekaligus lingkup norma-norma yang mendasari terapan ilmu tersebut.

Kaidah suatu ilmu harus mampu memiliki tiga sifat yaitu *pertama*, bahwa ilmu harus mampu melukiskan (*beschrijvend*) tentang mengapa ilmu itu ada. *Kedua*, menjelaskan (*verklaarend*) manfaat keberadaan ilmu itu, dan *ketiga*, ilmu itu harus bernilai (*waardierend*) dalam arti bahwa ilmu itu memberi makna terhadap kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, komunikasi politik terikat oleh nilai-nilai dan norma-norma; hakikat norma selalu melandasi sikap perilaku yang berkaitan pada perlindungan hak-hak asasi individu, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, ataupun individu sebagai elit berkuasa. Individu seperti disebutkan di atas, adalah pengelola sumber-sumber komunikasi yang terkait dengan tiga domain, yaitu *hak*, *kebebasan* dan *tanggung jawab* yang selalu memerlukan perlindungan hukum. Ketiga domain ini memiliki dasar moral yang patuh terhadap etika dan norma.

Hak-hak yang bersifat asasi, seperti hak berkomunikasi selalu melekat pada individu manusia dalam ruang lingkup kehidupan, baik dalam lingkup skala kecil maupun dalam lingkup skala besar dan luas.

Hak berkomunikasi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi tumpang tindih antara hak yang satu dengan hak yang lain, yang justru berakibat merugikan.

Demikian halnya antara kebebasan berkomunikasi dengan tanggung jawab berkomunikasi sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pengertian tentang kebebasan dan tanggung jawab dikemukakan oleh beberapa pakar, di antaranya Sean Mac Bride, Bakker dan Edmund Burke. Mereka mengemukakan pengertian yang sama, bahwa konsep kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor kebudayaan yang penting, yang selalu menyertai masyarakat dalam bentuk dan sifat yang bagaimanapun.

Sean Mac Bride memberi saran untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan, makna kebebasan itu harus disanding dengan tanggung jawab. Selanjutnya dikatakan bahwa tanggung jawab itu harus didasarkan kepada kebenaran, melebihi peraturan-peraturan yang berlaku

Berbeda dengan pemikiran Bakker yang melihat pengertian kebebasan dari dua sudut pandang, yaitu dilihat dari pemegang kekuasaan dan dari masyarakat. Bakker dalam judul bukunya *Principles of Social and Political Theory* mengatakan bahwa 'bukan saja negara yang dapat menerjang kebebasan ini, namun masyarakat pun dapat menggunakan kebebasan ini yaitu dengan prinsip mobilisasi pendapat umum'. Dalam suatu negara terdapat suatu ikatan yaitu *social society* dan *legal society*, maka dalam kebebasan terbagi pula dua kebebasan, yaitu *social liberty* dan *legal liberty*.

Negara dapat mengancam *social liberty*, yaitu bila kepada masyarakat dipaksakan suatu ideologi ataupun agama tertentu dengan sanksi-sanksi hukum. Dalam hal ini *legal liberty*, cenderung ke pelanggaran, karena bersifat diskriminatif terhadap anggota masyarakat, khususnya kelompok elit mendapat perlakuan berbeda di samping hak-hak istimewa (*privilege*) yang diperolehnya. Dalam hal ini keadilan hanya ditinjau dari sudut pandang yang kuat dan yang berkuasa.

Edmund Burke berpendapat bahwa setiap *hak* mempunyai dasar moral. Artinya setiap hak tidak dapat digunakan sepenuhnya, apabila ternyata bertentangan dengan norma yang berlaku atau dapat merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus ada manfaatnya, selain dimaksud untuk kemaslahatan manusia.

Menurut Bakker kebebasan seperti yang diartikan oleh hukum tidak pernah berarti kebebasan mutlak, melainkan harus memperhatikan pula kebebasan anggota masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, tepat apa yang dikemukakan Mac Bride bahwa konsepsi kebebasan dan tanggung jawab dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat dan temuan teknologi. Selanjutnya Mac Bride menjelaskan bahwa penguasaan sumber-sumber komunikasi oleh kelompok elit politik atau penguasa dalam bentuk sistem politik yang bagaimanapun bentuknya, merupakan suatu pelanggaran terhadap kebebasan.

Hubert Beuve Mery seorang anggota CIC, pada bulan Oktober 1979 berpidato di Tokyo, menyatakan bahwa kebebasan yang kita kenal tidak pernah diberikan secara sukarela, untuk itu kita harus berani membayar mahal, walaupun kebebasan itu dapat pula disalahgunakan. Dari kenyataan sejarah, penyalahgunaan kebebasan cenderung dilakukan oleh pihak penguasa ketimbang oleh masyarakat.

Demikian pula elit-elit politik yang duduk pada struktur puncak atau yang menguasai posisi pemerintahan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat, karena konsep-konsep perubahan atau modernisasi bersumber dari pemikiran para elit yang kemudian ditransfer ke dalam bentuk pesan-pesan komunikasi yang telah diformulasikan dalam bentuk yang cocok dengan kapasitas masyarakat.

Oleh sebab itu secara teoritis bahwa komunikasi politik lebih menyoroti sikap, perilaku para penguasa di dalam mengelola dan mengaktualisasikan sumber-sumber komunikasi sekaligus membentuk simbol-simbol komunikasi sebagai personifikasi atribut kekuasaan yang melekat pada para penguasa.

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang kajian teoritis, terlebih dahulu Anda menekuni pengertian komunikasi politik berikut ini.

1. Pengertian Komunikasi Politik

Para pakar dan teoretikus sepaham bahwa komunikasi politik erat kaitannya dengan kekuasaan dan sikap perilaku penguasa atau elit berkuasa.

Namun, belum ada satu definisi pun yang lengkap atau sempurna tentang pengertian komunikasi politik. Bahkan tidak mustahil pengertian komunikasi politik akan beragam sesuai disiplin ilmu yang melatar belakangi para teoretikus yang mencoba membahas pengertian tersebut.

Para teoretikus yang berlatar belakang ilmu pemerintahan, kemungkinan memiliki orientasi berpikir berbeda dengan yang berlatar belakang ilmu politik, atau ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara.

Demikian halnya para pakar dan teoretikus berlatar belakang murni ilmu komunikasi, maka orientasi berpikirnya cenderung lebih pada proses pertukaran simbol-simbol komunikasi dalam lingkup kehidupan bernegara.

Dikatakan *murni*, karena ilmu komunikasi merupakan ilmu ‘wadah’ dan ilmu ‘metoda’ yang dapat disanding oleh berbagai disiplin ilmu. Keragaman disiplin ilmu memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik.

Di bawah ini adalah pendapat para pakar dari berbagai disiplin ilmu.

Maswadi Rauf seorang pakar politik menempatkan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik. Maswadi berpendapat bahwa komunikasi politik adalah komunikasi bercirikan politik, karena terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Dalam kaitan pengertian tersebut, Maswadi Rauf mengkualifikasikan komunikasi politik dalam dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai suatu *kegiatan politik* dan sebagai *kegiatan ilmiah*.

Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik. (Rauf, 1993: 32-33).

Pengertian lain dikemukakan Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum, yang melihat komunikasi politik dari *sisi kegunaannya*. Menurut Rusadi komunikasi politik adalah *untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah*. (Rusadi, 1984 : 14).

Sisi pandang kedua pakar tersebut cukup memberi makna sangat berharga untuk menyusun kerangka pengertian komunikasi politik secara definitif.

Astrid S. Soesanto dalam buku ‘Komunikasi Sosial di Indonesia’ mengangkat suatu formulasi pengertian komunikasi politik yang diwarnai kajian ilmu hukum. Hal ini tampak dari kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertiannya, yaitu komunikasi politik adalah “...komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga

masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik”.

Dari kata-kata *mengikat* dan *sanksi* memberi isyarat bahwa disiplin ilmu hukum telah memperkaya formulasi pengertian komunikasi politik yang diangkat Astrid, karena kedua kata tersebut sebagai terminologi yang biasa digunakan dalam kajian ilmu hukum.

Formulasi pengertian yang sangat unik dikemukakan oleh Dan Nimmo dalam buku ‘Political Communication and Public Opinion in America”.

“... it is a book of political communication (activity) consider political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict (1980 : 7).

Dalam buku ini, Dan Nimmo menggunakan istilah politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan seseorang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Keunikan formulasi pemikiran Dan Nimmo adalah kalimat *kondisi konflik sosial*, walaupun belum merupakan suatu konstruksi pemikiran secara definitif tentang apa itu komunikasi politik. Namun dalam ungkapan tersebut, Dan Nimmo melihat kegiatan politik dari situasi perselisihan (konflik). Padahal sebaliknya, kehadiran komunikasi politik adalah untuk mewujudkan kondisi sosial, kondisi pemerintahan dan kondisi negara dalam keadaan tenteram dan harmonis. Oleh karena itu, akan lebih jelas tentang pengertian komunikasi politik apabila Dan Nimmo mengangkat buah pikiran Mark Roclofs.

Pengertian yang dikemukakan oleh Roclofs tentang komunikasi politik dalam kalimat sederhana, yaitu komunikasi politik adalah pembicaraan tentang politik atau *kegiatan politik adalah berbicara*.

Dari pengertian-pengertian komunikasi politik para pakar, baik pakar politik maupun pakar komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi politik berkaitan dengan struktur kekuasaan atau struktur pemerintahan. Komunikasi politik berlangsung dalam suatu tatanan sistem nilai, berada dalam pola keyakinan atau pola kepercayaan.

Apa yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas cukup untuk memberi pedoman, dalam membentuk suatu pengertian tentang apa itu komunikasi politik. Sebagai suatu acuan, dapat diformulasikan suatu pengertian tentang apa itu komunikasi politik, sebagai berikut.

“Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti”.

Pengertian tersebut menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat, untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat integratif.

Konstruksi pengertian tersebut mencerminkan suatu bangunan kehidupan negara dan pemerintahan dengan segala kompleksitasnya di dalam mencapai tujuan negara, sehingga akan tampak jelas perpaduan seluruh unsur yang ada dalam lingkup negara sebagai produk komunikasi politik. Karena itu, proses komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampakkan identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni (*pure science*) yang bersifat ideal, maupun sebagai ilmu terapan (*applied science*) yang berada dalam dunia empiris.

Dari format pengertian yang diangkat oleh para pakar dan para teoritikus dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi politik pada dasarnya sebagai personifikasi sikap perilaku para elit berkuasa di dalam mengaktualisasikan kekuasaan dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi.

2. Para Komunikator Politik

Dalam kajian teoritis (*das sollen*), komunikator politik berada dalam dua status; yaitu komunikator politik yang menduduki struktur kekuasaan atau komunikator elit berkuasa dan komunikator yang berada pada struktur masyarakat atau elit masyarakat yang tidak menduduki struktur kekuasaan.

Dalam setiap struktur masyarakat, kaum elit selalu memegang posisi penting dan yang menentukan kebijakan (*policy maker*).

Seorang teoritikus pertama yang memberi analisis secara sistematis tentang konsep elit adalah Gaetano Mosca. Mosca membagi kelompok masyarakat dalam dua kelompok, yaitu kelompok elit dan kelompok massa. Kelompok elit selalu memegang fungsi sebagai pemimpin, sedangkan massa selamanya berada pada kelompok yang dipimpin.

Sedangkan Schrool berpendapat bahwa elit itu menunjukkan pada sekelompok dalam masyarakat yang menempati kedudukan tinggi, atau berada pada struktur puncak baik bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Pengertian elit ini dapat diartikan secara umum atau secara khusus. Secara khusus yaitu sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu. Namun, tipe kaum elit ini tidak sama, bergantung kepada bentuk masyarakat dan sistem yang berlangsung dalam masyarakat bersangkutan.

Teori-teori klasik yang membahas masalah elit, di antaranya teori dari C. Wright Mills, Raymond Aron, Harold Lasswell, Gaetano Mosca dan banyak lagi sarjana sosiologi dan para ilmuwan politik yang menganalisis masalah elit ini.

Schrool membagi tipe elit menjadi lima, yaitu:

- a. elit kelas menengah;
- b. elit dinastik;
- c. pejabat kolonial;
- d. kaum intelek revolusioner;
- e. pemimpin-pemimpin nasional.

Kelima macam tipe ini dapat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Mosca, yaitu:

- a. elit yang memerintah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemerintahan;
- b. elit yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elit.

Secara ideologis, kelima macam elit tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh latar belakang munculnya elit tersebut.

Misalnya saja elit menengah berasal dari kelompok-kelompok pedagang dan tukang, termasuk pula golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan.

Setiap kesempatan digunakan untuk memperbaiki kedudukan sendiri. Secara ideologis elit tersebut memiliki ideologi mudah berubah dan tidak tegas, serta sikap dan pandangannya lebih bersifat individualistis. Tidak ada pandangan yang jelas tentang masyarakat ideal, yang paling penting mobilisasi sosial dilaksanakan untuk tercapainya kepentingan pribadi.

Struktur masyarakat bersifat terbuka dan bebas bagi para inisiator dan aktivis swasta.

Berbeda dengan ‘*aristokrasi*’, pandangan ideologinya di titik beratkan pada upaya untuk mempertahankan tradisi dan status quo. Tradisi pulalah yang dijadikan dasar untuk membenarkan kewibawaan dan kekuasaan. Negara-negara yang termasuk dalam kualifikasi elit dinasti ini, misalnya Jepang, Jerman, Iran, Amerika Latin, Timur Tengah dan sebagian kecil di Asia.

Demikian pula elit revolusioner atau kaum intelek revolusioner, menunjukkan karakteristik menonjol. Elit ini berpandangan bahwa semua nilai lama perlu dirombak dan dihapus, karena tidak cocok dengan selera zaman. Ideologinya berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Struktur masyarakat berusaha menciptakan suatu sistem sosial politik baru tanpa mengabaikan pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan legitimasi dalam bidang ideologi, diadakan penekanan kuat. Seluruh struktur yang ada diabdikan untuk kepentingan revolusi. Contoh negara ini adalah negara-negara komunis seperti RRC, Soviet (sebelum musnah), Hungaria, Cuba, Lybia, Ceko-slovakia dan lain-lain.

Elit yang terakhir yaitu elit nasional, elit ini seperti di Indonesia, Mesir dan Mexico. Elit-elit ini muncul dari gerakan sosio-politik melawan penjajahan. Elit nasionalistik merupakan kelompok plural sehingga mudah terjadi konflik di antara elit-elit tersebut. Sistem pemikiran belum mencerminkan seluruh aspirasi masyarakat, dan hampir semua tindakan dilandasi faktor sentimen serta nilai-nilai kebanggaan bangsa. Adakalanya elit ini sering bertindak tidak atas dasar kenyataan, sehingga tidak jarang timbul sifat utopis. Garapan pembangunan seluruhnya didorong oleh suatu motivasi kejayaan dan keagungan bangsa, tanpa melihat realitas kehidupan infrastruktur.

Tinjauan secara umum, seluruh elit mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi berlangsungnya suatu sistem, dan setiap elit menghendaki adanya perubahan-perubahan untuk kemajuan negaranya. Besar kecilnya perubahan tersebut, terkait pada motivasi yang melandasi peranan elit-elit di negara yang bersangkutan. Namun demikian, pada prinsipnya seluruh elit berusaha mempertahankan status quo, tidak menghendaki pergeseran-pergeseran, kedudukannya.

Demikian pula elit politik yang menjadi sasaran di dalam mengaplikasikan ideologi atau doktrin politiknya, maka posisi-posisi puncak merupakan target utama. Penguasaan terhadap organ dan struktur puncak berarti mempunyai kekuasaan (power) dan wewenang (*authority*).

Di dalam sejarah, kekuasaan mempunyai peranan yang menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan dalam percaturan politik selalu menjadi objek setiap elit politik. Personifikasi dari kekuasaan adalah pemimpin, dan dengan kepemimpinan yang melembaga pada dirinya memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuasaan dan wewenangnya.

Kekuasaan memiliki ragam variasi dan bentuk serta sumber yang berbeda pula. Jadi kekuasaan terdapat di mana-mana, dalam hubungan sosial dan dalam organisasi-organisasi sosial. Namun, kekuasaan tertinggi ada pada organisasi yang dinamakan 'Negara'. Negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*), dan kedaulatan ini dijalankan oleh sekelompok elit yang menamakan dirinya '*the ruling class*'.

'*The ruling class*' dalam melaksanakan peranan dan fungsi pemerintahan selalu berusaha untuk meyakinkan masyarakat, dan berusaha pula untuk mendapat dukungan masyarakat, sehingga masyarakat mengakui dan menerima kekuasaan '*the ruling class*' tersebut.

Dalam kajian komunikasi politik, maka para elit dikuantifikasikan sebagai komunikator utama politik baik pada struktur kekuasaan maupun yang ada pada infrastruktur.

Dalam upaya menanamkan kekuasaan, harus berdasar norma-norma atau nilai serta kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat.

B. KOMUNIKASI POLITIK DALAM KAJIAN EMPIRIS

Dalam kajian empiris maka komunikasi politik telah berada dalam alam nyata atau berada dalam wilayah *das sein* yaitu sebagai ilmu terapan (*applied science*).

Dalam wilayah *das sein* atau ilmu terapan, maka komunikasi politik sangat bergantung pada sistem politik tempat komunikasi politik diterapkan.

Secara universal sistem politik menampakkan karakter sama yaitu terdiri dari dua sub-sistem. *Pertama*, sub-sistem suprastruktur (*the governmental political sphere*), sebagai suasana kehidupan politik pemerintah, dan *kedua* adalah subsistem infrastruktur yaitu suasana kehidupan politik masyarakat (*the socio political sphere*). Kedua suasana tersebut, saling berpengaruh

secara berkaitan, sehingga *suprastruktur* sebagai cerminan dari *infrastruktur*, bahkan *suprastruktur* harus mengakomodasikan kehidupan *infrastruktur*, dan sebaliknya *infrastruktur* sebagai replika dari *suprastruktur*.

Untuk memberi kejelasan tentang sistem politik dengan kedua sub sistemnya, sebaiknya Anda pahami terlebih dahulu tentang apa itu sistem politik. Menurut Robert Dahl dalam buku berjudul “*Modern Political Analysis*”, sistem politik adalah:

“any persistent pattern of human relationship that involved to a significant of extent power, influence, control, rule or authority”.

Sistem politik menurut Dahl, sebagai pola tetap hubungan manusia yang terkait berbagai kepentingan tentang kekuasaan, pengaruh, pengendalian, aturan dan wewenang. Dari ungkapan ini, perlu Anda pahami tentang *pola tetap*, yaitu suatu pola yang telah baku dan telah menjadi standar atau ukuran dalam kehidupan negara. *Pola tetap* mengandung makna pula sebagai pola yang berdasar pada sistem nilai tertentu yang berlaku pada sistem tertentu pula.

Demikian halnya komunikasi politik apabila sebagai suatu sistem maka komunikasi tersebut berada pada sistem tertentu.

Secara empiris, sistem komunikasi terpilah ke dalam empat sistem besar yaitu:

1. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem totaliter (*authoritarianism system*).
2. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem liberal (*libertarian system*).
3. Komunikasi politik yang diaktualisasikan pada negara penganut sistem tanggung jawab sosial (*social responsibility*).
4. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem komunis.

Keempat macam sistem memunculkan karakter yang berbeda, namun pembahasan lebih rinci akan Anda pelajari pada modul berikutnya.

Secara empiris semua negara mengklaim bahwa negara bersangkutan mengaktualisasikan komunikasi politik pada tataran demokrasi. Hal ini merujuk kepada pendapat Jucuis yang menyatakan bahwa:

“komunikasi baru akan berkembang, apabila tidak terikat oleh sejumlah peraturan yang mendominasi perkembangan publik opini yang ada pada masyarakat. Komunikasi dari bawah ke atas dengan menggunakan saluran tidak resmi baru dapat berjalan apabila struktur pemerintahan membuka lebar terhadap masuknya *input* dari bawah (infrastruktur)”.

Lingkaran komunikasi sebagaimana yang digambarkan Jucuis, hanya akan terdapat pada negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi, menghargai pendapat dan pemikiran orang lain. Seperti halnya di Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan negara-negara Eropa Barat lainnya.

Pada negara-negara demokrasi, tendensi ke arah demokratisasi komunikasi (*democratization of communication*) lebih memungkinkan, karena lembaga *input* benar-benar berfungsi dan terdapat perkembangan pendapat umum secara wajar. Kaitan dengan demokratisasi komunikasi ini Sean Mac. Bride memberikan batasan sebagai berikut.

“Democratization can be defined as the process where by: (a) the individual becomes an active and not a more object of communication; (b) the variety of messages exchanged increases; and (c) the extend and quality of social representation or participation in communication are augmented”. (1980, 166).

Terjemahannya adalah

“Demokrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses di mana: (a) individu dijadikan sebagai partner yang aktif dan tidak sebagai objek komunikasi saja; (b) meningkatnya pesan yang dipertukarkan; dan (c) mendorong perkembangan dan kualitas komunikasi yang mewakili masyarakat”.

Pendapat Mac Bride ini, memberikan suatu perspektif adanya sistem *input* dan *output* yang seimbang, di mana suprastruktur membutuhkan respons atau *feedback* sebagai bahan kebijakan komunikasi (*communication policy*).

Berbeda dengan negara totaliter, maka komunikasi hanya berjalan satu arah tanpa ada respons atau ‘kaitan balik’ (*feedback, terugkoppeling*) secara sempurna dari arah berlawanan. Shils menggunakan konsep totaliter, karena sistem-sistem yang ada tidak mentolelir adanya pusat-pusat kekuasaan lainnya, selain misalnya partai tunggal atau partai dominan, karena ada usaha untuk mendominasi semua bidang kehidupan pusat. Dalam hal ini Shils memasuki negara komunis dalam kualifikasi negara totaliter model baru.

Di negara-negara penganut sistem demokrasi, pengelolaan sumber-sumber komunikasi dipilah ke dalam tiga fungsi kekuasaan yaitu:

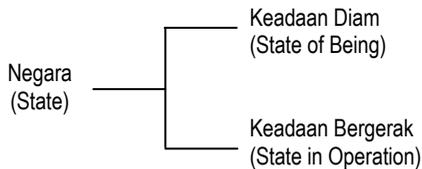
1. Fungsi pemerintahan (*Executive*).
2. Fungsi pembentuk perundangan (*Legislative*).
3. Fungsi pengadilan (*Judicative*).

Fungsi yang paling tinggi frekuensinya mengelola sumber-sumber komunikasi yaitu berada pada fungsi pemerintahan.

Ketiga fungsi tersebut bersifat dominan, artinya antara dominan yang satu tidak dapat diganti atau digeser oleh dominan lainnya.

Namun demikian fungsi-fungsi tersebut tidak akan bermakna apabila tidak dijiwai oleh komunikasi. Sedang komunikasi merupakan kehidupan masyarakat atau negara.

Untuk lebih jelasnya, cermati ragaan berikut ini.

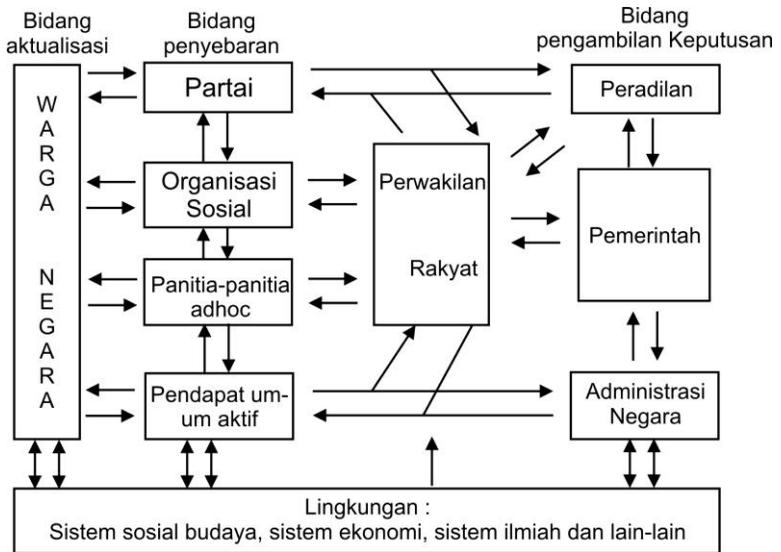


Gambar 1.1

Negara dalam keadaan bergerak dengan administrasi negara sebagai urat nadinya dan komunikasi sebagai jiwanya.

Dalam mengisi struktur kekuasaan maka komunikasi berfungsi sangat efektif. Komunikasi berfungsi memotivasi dan memprakondisikan pendapat umum agar mendukung terselenggaranya pengisian struktur kekuasaan tersebut. Dalam pengisian struktur kekuasaan diselenggarakan melalui suatu proses demokrasi yang disebut pemilihan umum.

Untuk mengisi struktur perwakilan atau lembaga legislatif maka rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan partai politik, sedangkan untuk memilih pimpinan eksekutif yaitu presiden maka rakyat memilih secara langsung. Pemilihan secara ini, berlaku di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidentil. Untuk lebih jelas, Anda tekuni ragaan berikut ini.



Sumber asli: Horst Decker et. Al., Einführung in die Kommunikation swissenschaft, der Prozess der Politischenmeinungs und Wilenbildung Teil I; ein Kurs im Medienverband, Universtat Munchen. Verlag Dokumentation, Munchen. 1976, h. 101 disunting oleh Dr. Phil. Astrid S. Soesanto. Komunikasi Sosial di Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1980, hal 40.

Gambar 1.2.
Sistem Formal Komunikasi Politik

Dari ragaan di atas Anda dapat lebih memahami bahwa secara empirik suasana kehidupan komunikasi politik berada dalam dua suasana yaitu suprastruktur komunikasi dan infrastruktur komunikasi.

Pada suprastruktur komunikasi terdiri dari para pengelola sumber komunikasi sesuai dengan fungsi kekuasaan. Sedangkan pada infrastruktur atau suasana komunikasi masyarakat yang terdiri dari para pengelola sumber komunikasi sesuai kebutuhan unsur-unsur yang ada pada infrastruktur.

C. HAKEKAT *FEEDBACK* DAN RESPONS

Feedback dan respons merupakan spesifik kajian disiplin ilmu komunikasi dan karakteristik ilmu ini. *Feedback* dan respons (*response*) sebagai unsur komunikasi yang mempunyai makna yang sama, sebagai pembeda dari kedua istilah ini, yaitu berlangsungnya proses komunikasi. *Feedback* berada pada proses komunikasi langsung sedang *response* berada dalam proses komunikasi tidak langsung.

Untuk lebih memahami kedua istilah tersebut, Anda dapat tekuni uraian berikut ini.

1. *Feedback* (umpan balik)

Dalam proses komunikasi *feedback* (umpan balik) merupakan indikator yang menandakan berlanjut tidaknya proses komunikasi tersebut. Di samping itu, dapat pula dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat rujukan atau kapasitas komunikan.

Dalam kerangka sistem politik maka, berfungsi tidaknya *feedback*, dapat dijadikan tolok ukur untuk memahami dalam sistem apa komunikasi itu berada. Pada sistem politik totaliter, *feedback* hampir tidak berfungsi, bahkan secara ekstrim pada sistem totaliter tidak pernah ada *feedback*, karena seluruh isi komunikasi telah didesain pada konstruksi tertentu dalam simbol-simbol kekuasaan menurut pemikiran Marxisme. Namun, dalam sistem demokrasi maka *feedback* merupakan *masukan* (input) berharga untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan awal. Menurut Djalaludin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Komunikasi” dinyatakan bahwa *feedback* berfungsi sebagai peneguh (*reinforcement*) yang dapat mendorong atau merintanginya berlanjutnya proses komunikasi.

Feedback dapat dikategorikan ke dalam beberapa istilah, yaitu: *feedback* bebas, *feedback* tersembunyi, *feedback* nol dan *feedback* terarah. Istilah-istilah ini menunjukkan kepada perbedaan kualitas reaksi yang diberikan komunikan terhadap komunikatornya.

Seluruh reaksi komunikan merupakan *feedback* yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, oleh karena itu tidak selamanya istilah *feedback* digunakan hanya dalam komunikasi kontak langsung. Istilah *feedback* dapat pula digunakan dalam proses komunikasi dengan menggunakan media atau komunikasi tidak langsung.

Larry Lee Barker dalam bukunya “*Listening and Feedback*” mengemukakan bahwa *feedback* adalah pesan komunikasi yang menunjukkan tingkat pengertian atau tingkat kesesuaian antara dua orang komunikator atau lebih, tentang reaksi komunikan terhadap sumber pangkal.

Selanjutnya dikatakan, *feedback* adalah reaksi terhadap berbagai aspek yang ditumbuhkan oleh sumber awal dalam berlangsungnya suatu proses. Dilihat dari fungsinya, *feedback* dapat dikuantifikasikan ke dalam tiga fungsi, yaitu:

- a. untuk mengevaluasi tentang kualitas komunikan;
- b. membantu dalam merangsang ke arah perubahan;
- c. memperteguh dalam memberi penghargaan atau sebaliknya.

Dari ungkapan Lee tersebut di atas, menunjukkan bahwa *feedback* berfungsi ganda, yaitu bagi komunikator sebagai ukuran untuk introspeksi kemampuan diri di dalam berkomunikasi, dan bagi komunikan untuk mengetahui tingkat reaksi komunikan.

Dalam kaitan komunikasi politik, maka *feedback* merupakan masukan (input) bagi elit pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan komunikasi berikutnya.

Menurut John Gardner dalam bukunya “*A Synthesis of Experimental Studies of Speech Communication Feedback*”, bahwa *feedback* untuk komunikasi pemerintah (sebagai *output*) dapat dilakukan dalam dua bentuk:

- a. Reaksi, sikap atau jawaban yang dinyatakan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- b. Reaksi dalam bentuk aktivitas fisik seperti: demonstrasi, unjuk rasa, mogok, boikot, pesta-pora dan bentuk lainnya.

Dalam kenyataan empiris, *feedback* dapat dilakukan tidak hanya terhadap lembaga eksekutif (pemerintah), tetapi juga terhadap legislatif serta lembaga yudikatif.

Feedback kepada lembaga eksekutif merupakan *input* untuk menyusun kebijakan publik yang disebut kebijakan umum pemerintah (*general public policy*), *feedback* yang masuk kepada pemerintah sebagai *input* untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah, sedangkan yang masuk ke lembaga legislatif sebagai *input* untuk menyusun perundangan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Secara kualitatif *feedback* dapat dikuantifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. berkadar rendah.
2. berkadar biasa.
3. berkadar tinggi.

Untuk mengukur kadar ini dapat diperhatikan dari cara mengemukakan tanggapan atau reaksi, yaitu bobot tanggapan dan relevansi antara reaksi dengan sumber awal.

Feedback berkadar rendah, yaitu *feedback* yang berbobot interes subjektif, reaksi yang diberikan bersifat emosional dan lebih bersifat aktivitas fisik, seperti demonstrasi, boikot dan lain-lain.

Feedback peringkat kedua berkadar biasa, *feedback* terkait kepentingan individual, namun pada peringkat ini *feedback* yang bersifat konseptual tidak pernah terjadi. Sedangkan, *feedback* berkadar tinggi, berdasar pada rujukan banding yang bersifat argumentatif dan normatif, yaitu dalam bentuk saran, kritik, pendapat dan hasil kajian. *Feedback* dalam kadar ini disebut pula *rational feedback* (umpan balik rasional) atau *ideal feedback* (umpan balik ideal).

Dalam proses komunikasi politik, *feedback* yang menjadi perhatian pemerintah (elit berkuasa) yaitu *feedback* berkadar tinggi atau *feedback* infrastruktur, karena elit ini mampu mempengaruhi lingkungan masyarakat untuk berada di pihaknya.

Feedback elit infrastruktur dapat bersifat positif dan dapat pula negatif. *Feedback* positif yaitu yang dapat dijadikan bahan penyempurnaan sumber awal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. terkaitnya dengan beberapa kepentingan elit dalam sumber awal;
- b. terdapat kesesuaian antara *output* awal dengan ide atau konsep elit infrastruktur;
- c. terdapatnya persepsi bahwa *output* menguntungkan elit infrastruktur;
- d. merupakan tanggung jawab moral, karena adanya jalinan komunikasi dengan elit suprastruktur (elit berkuasa).

Karakter *feedback* pada alternatif ini adalah dalam bentuk:

- a. Saran dan pendapat.
- b. Konsep pemikiran.

- c. Pendekatan untuk mencari jalan keluar.
- d. Memperkuat sumber *output* awal.

Untuk menciptakan kondisi semacam itu, maka elit suprastruktur selalu menjalin komunikasi dengan elit infrastruktur. Hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi silang pandang atau perbedaan persepsi yang dapat mengganggu hubungan mereka. Kehilangan dukungan elit infrastruktur dapat diterjemahkan bahwa kedudukan elit berkuasa bersifat labil atau goyah, karena suatu saat elit infrastruktur atau elit lainnya dapat menggeser atau mengganti kedudukannya.

Feedback negatif yaitu reaksi yang bersifat apriori terhadap segala upaya pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, karena perbedaan pola keyakinan antara elit infrastruktur dengan elit suprastruktur, sehingga terdapat sifat apriori terhadap sumber *output* awal. *Kedua*, terdapat predisposisi atau sikap elit infrastruktur yang berniat menggeser elit suprastruktur. *Ketiga*, karena tidak terpenuhinya tuntutan dan kepentingan elit infrastruktur.

Dalam negara penganut sistem demokrasi, maka *feedback* mendapat tempat istimewa, karena *feedback* merupakan masukan berharga untuk menyempurnakan kebijakan komunikasi pemerintah. Hal ini berdasar pula pada suatu pandangan, bahwa *feedback* merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yaitu hak berkomunikasi.

Hak-hak berkomunikasi melekat pada diri manusia semenjak manusia lahir, namun penggunaan hak-hak ini sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Sama halnya sifat ketergantungan *feedback* terhadap sistem politik tersebut.

Dari uraian di atas memberi suatu informasi bahwa *feedback* tidak sekedar dalam komunikasi langsung (*direct communication*), namun termasuk di dalamnya komunikasi tidak langsung (*indirect communication*) artinya respons tercakup di dalamnya.

Pendapat lain menyatakan (terutama pakar komunikasi UNPAD) *feedback* harus dibedakan dari respons, karena respons muncul terhadap komunikasi tidak langsung. Untuk jelasnya, Anda diharapkan untuk mempelajari tentang apa itu respons berikut ini.

2. Respons (reaksi)

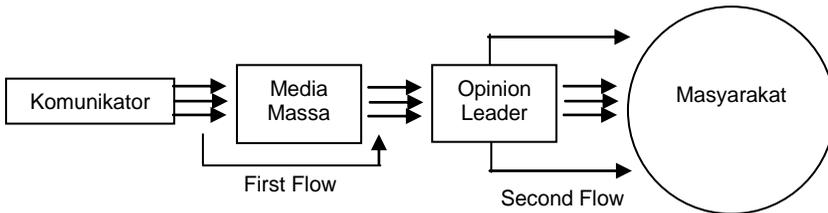
Sama halnya dengan *feedback*, respons merupakan *input* bagi penguasa atas kebijakan-kebijakan yang dibentuk penguasa.

Respons dapat bersifat positif namun dapat pula negatif, tergantung pada sifat kebijakan apakah bersifat akomodatif atau tidak terhadap tingkat kepentingan masyarakat.

Respons memerlukan waktu relatif beda dengan *feedback*, oleh karena timbulnya respons sebagai reaksi yang dirangsang media massa, baik elektronik maupun cetak. Tidak mustahil respons terjadi sebagai akibat aktifnya para pemuka pendapat (*opinion leader*) atau tokoh masyarakat (*informal leader*) yang termotivasi oleh pesan-pesan komunikasi melalui media.

Dalam kaitan ini dapat merujuk kepada konsep pemikiran Wilbur Schramm dalam bukunya “*Process and Effect of Mass Communication*” terbitan tahun 1960an yang dianggap kuno, namun buku ini merupakan cikal-bakal kajian komunikasi yang memberi kontribusi cukup besar dan sangat berharga.

Wilbur Schramm mengangkat suatu teori yang disebut “*Two Step Flow of Communication*” atau komunikasi dua tahap sebagaimana ragaan berikut ini:



Gambar 1.3

Pada ragaan di atas, muncul beberapa informasi bahwa komunikasi melalui media massa tidak langsung diterima masyarakat secara umum tapi harus menembus dulu para pemuka pendapat (*opinion leader*), tingkat validasi isi komunikasi sangat bergantung kepada tingkat kepentingan para *opinion leader*, sehingga reaksi masyarakat (*response*) sangat bergantung pula kepada tingkat kepentingan *opinion leader*.

Tingkat validitas isi komunikasi pada “First Flow” akan berubah setelah diinterpretasikan oleh *opinion leader*, sehingga dapat positif atau negatif pada waktu diterima masyarakat atau pada tahap “Second Flow”.

Dari uraian di atas, respons yang muncul diukur oleh kapasitas masyarakat sebagai komunikan. Teristimewa apabila *opinion leader* terdiri dari berbagai ragam ideologi, maka respons yang muncul sesuai warna ideologi masing-masing *opinion leader*. Terlepas respons itu bersifat mendukung atau menentang terhadap isi komunikasi, namun yang jelas bahwa respons tidak terikat oleh ruang dan waktu, artinya respons tidak bersifat langsung sebagaimana pada *feedback*.

Selain itu, respons dapat muncul pula melalui proses pembentukan pendapat umum, biasanya terhadap kebijakan-kebijakan komunikasi yang mengundang kontroversi pendapat sesuai dari sudut pandang mana pendapat umum itu muncul. Pendapat umum sebagai penilaian sosial (*social judgement*) muncul melalui proses diskusi dan adu argumentasi secara sadar. Pendapat umum lebih tinggi tingkat intensitasnya oleh peristiwa-peristiwa politik. Oleh karena itu, pendapat umum sebagai bentuk respons muncul dengan waktu yang relatif lama.

Respons dapat pula berbentuk produk para pakar yang diangkat dalam diskusi panel yang hasilnya disampaikan kepada pemerintah sebagai suatu rekomendasi.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *feedback* dapat dibedakan dari respons. Namun keduanya sebagai produk proses komunikasi politik.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa komunikasi politik dikuantifikasikan sebagai ilmu tidak bebas nilai? Jelaskan!
- 2) Jelaskan tiga karakteristik suatu ilmu?
- 3) Jelaskan apa yang dimaksud dengan *legal liberty* dan *social liberty*?
- 4) Jelaskan tentang teori elit yang Anda ketahui?
- 5) Apa sebab para elit dimasukkan sebagai komunikator utama politik?

- 6) Lembaga apa yang paling tinggi tingkat frekuensinya mengoperasikan sumber-sumber komunikasi?
- 7) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang *feedback*?
- 8) Ada berapa macam *feedback* yang Anda ketahui? Jelaskan!
- 9) Pada proses komunikasi bagaimana respons muncul? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan, pelajari dengan cermat materi Kegiatan Belajar 2. Jika Anda belum paham diskusikanlah dengan teman atau tutor Anda.



RANGKUMAN

Kajian teoritis komunikasi politik berada dalam dunia angan-angan dalam wilayah Das Sollen atau apa seharusnya ilmu itu. Secara Das Sollen maka komunikasi politik terikat oleh kaidah-kaidah keilmuan, sehingga ilmu tidak bebas nilai (non value free).

Komunikasi politik mengkaji pula tentang kebebasan dan tanggung jawab individu manusia, baik sebagai penguasa pengelola sumber-sumber komunikasi maupun individu secara perorangan atau kelompok sebagai pengguna jasa komunikasi.

Kebebasan tidak dapat digunakan secara mutlak karena berdampingan dengan tanggung jawab. Secara empiris komunikasi politik berada dalam dunia nyata, sebagai *applied science* atau dalam wilayah *das sein* yang bergantung kepada sistem nilai.

Sistem komunikasi politik terbagi ke dalam dua subsistem yaitu suprastruktur dan infrastruktur komunikasi.

Feedback dan *response* adalah karakteristik kajian ilmu komunikasi. *Feedback* adalah tolok ukur untuk memahami sistem apa komunikasi itu berada. *Feedback* dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan yaitu *feedback* berkadar rendah, *feedback* berkadar biasa dan *feedback* berkadar tinggi.

Feedback dapat berkembang pada negara-negara penganut sistem demokrasi, sedangkan pada negara-negara totaliter *feedback* hampir tidak ada. *Feedback* muncul dalam komunikasi kontak langsung (*direct communication*). *Response*, sama halnya dengan *feedback*, merupakan *input* bagi pemerintah. *Response* muncul pada komunikasi tidak langsung. Pada tingkat tertentu *response* muncul sebagai akibat

keterlibatan para *opinion leader*, sehingga *response* diwarnai oleh karakter *opinion leader* tersebut.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Komunikasi politik sangat bergantung kepada struktur kekuasaan, sebab
 - A. pada hakikatnya komunikasi politik membahas aktor-aktor politik dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi
 - B. komunikasi politik mengkaji simbol-simbol kekuasaan
 - C. komunikasi politik mengoperasikan simbol-simbol kekuasaan
 - D. struktur kekuasaan memberi warna dominan terhadap proses komunikasi politik

- 2) Dalam proses komunikasi politik para elit politik memegang peran utama, karena para elit
 - A. pembentuk simbol-simbol komunikasi kekuasaan
 - B. mengendalikan sumber-sumber komunikasi
 - C. berada pada sumbu kekuasaan
 - D. mengendalikan dan mengawasi sumber-sumber komunikasi

- 3) Pengelolaan simbol-simbol komunikasi dipengaruhi oleh infrastruktur politik, sebab
 - A. pengisian struktur kekuasaan suprastruktur hakikatnya diisi oleh unsur yang ada pada infrastruktur
 - B. pengelola simbol komunikasi pada prinsipnya berasal dari infrastruktur
 - C. suprastruktur atau para komunikator utama muncul dari infrastruktur
 - D. infrastruktur dapat menjatuhkan reputasi para pengelola simbol komunikasi melalui mobilisasi pendapat umum

- 4) Yang membedakan kajian komunikasi secara empiris dari teoritis kajian empiris
 - A. sangat bergantung sistem nilai
 - B. berada dalam dunia nyata
 - C. berada dalam wilayah Das Sein
 - D. bersifat ilmu terapan (applied science)

- 5) *Feedback* adalah salah satu unsur komunikasi, karena *feedback*
- sebagai umpan balik kepada sumber awal
 - reaksi terhadap materi komunikasi
 - sebagai bahan *input*
 - adalah sikap tidak setuju
- 6) *Feedback* sebagai umpan balik muncul pada proses komunikasi
- kontak langsung
 - antar personal
 - group approach*
 - yang bersifat diskusi
- 7) Umpan balik (*feedback*) akan muncul dalam bentuk
- saran atau rekomendasi
 - pertanyaan atau pernyataan masalah
 - penolakan atau ketidaksetujuan
 - pembenaran atau *judgement*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) A
- 6) A
- 7) D

Daftar Pustaka

- Altamini, A. Hamid S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Astrid S. Soesanto. (1975). *Komunikasi Sosial*. Jakarta: Bima Cipta.
- Dahl, Robert. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis*. Jakarta: Rajawali.
- Franz Magnis Suseno. (1987). *Etika Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Maswadi Rauf dan Mappa Narsun. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nimmo, Dan. (1978). *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publishing Company, Santa Monica.
- Rusadi Kantaprawira. (1993). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Sumarno, AP. (1993). *Pengantar Studi Komunikasi Politik*. Bandung: Orba Sakti.
- . (1995). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Al Khasan.